

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Konstruksi Realitas

Konstruksi secara umum merujuk pada suatu proses membangun atau menciptakan sesuatu. Konteks konstruksi dalam sosial dan psikologi mengarah pada bagaimana individu atau suatu kelompok membentuk pemahaman, makna dan interpretasi terhadap dunia di sekitar mereka. Konstruksi ini diliput dalam berbagai aspek seperti ide, nilai, norma dan praktik yang dibentuk, dimaknai, dipahami melalui interaksi sosial membentuk realitas sosial (Hadiwijaya, A. 2023). Konstruksi realitas merupakan proses fundamental dalam pembentukan pemahaman manusia terhadap dunia sosialnya. Proses ini erat berkaitan dengan konteks sosial, historis dan kultural yang melingkupi suatu hal tersebut.

Berger dan Luckman (1966; dalam Dharma, 2018) mengungkapkan manusia berada dalam kenyataan objektif dan subyektif. Kenyataan itu dipahami tidak sebagaimana benarnya. Kenyataan obyektif manusia dipengaruhi oleh struktural berdasar pada lingkungan manusia tinggal. Sementara itu, dalam kenyataan subyektif manusia memiliki kecenderungan tertentu yang memiliki kuasa untuk ambil alih dunia tergantung pada bagaimana realitas itu bagi tiap individu. Pamungkas (2024) menyebutkan konstruksi realitas sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor sosial. Foss (dalam Karman, 2015) menyebutkan bahwa inti dari adanya gagasan konstruksi sosial yakni memahami pengetahuan merupakan hasil dari interaksi simbolik di antara kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat dalam proses ini dipahami sebagai sebuah *konstruksi* yang merupakan realitas tidak pasti.

James Carey (dalam Karman, 2015) mendukung hal tersebut dengan menggabungkan empat tahapan untuk memahami konstruksi sosial yakni konstruksi, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan. Proses konstruksi sosial terdiri dari aktor yang mengembangkan soal *kenyataan* itu, dan aktor tersebut perlu untuk aktif memelihara suatu konstruksi sadar dan tidak sadar mewujudkan suatu makna tertentu. Konstruksi sosial juga pada prosesnya mengalami penyesuaian (*change*) untuk memahami konteksnya semakin berlanjut karena proses konstruksi sosial atas realitas ini berjalan lambat.

Berger dan Luckmann mendasari pada pemahaman ini menggambarkan pada proses dialektis yang berkelanjutan memahami bagaimana realitas sosial terbentuk dan dibentuk. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pengetahuan ditentukan oleh lingkungan sosial dan struktur sosial akan menciptakan pengetahuan. Posisi ini menegaskan bahwa semua pengetahuan berkembang seiring dengan kondisi sosial dan material. Realitas sosial adalah sesuatu yang dihasilkan dan dikomunikasikan dan diturunkan melalui sistem. Proses dialektis yang berkelanjutan ini diidentifikasi pada tiga momen fundamental dalam realitas sosial: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Pamungkas, dkk. 2024).

Eksternalisasi merupakan bentuk pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik dan mental dalam membentuk suatu realitas. Hal ini bekerja seperti pada pemberian nama, istilah tertentu, yang membentuk suatu “identitas” terbaru atas apa yang terberi (Mawikere, dkk. 2022). Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Proses ini memasuki pembentukan fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar dan terpisah dari manusia, mencakup

institusionalisasi dan legitimasi (Pamungkas, dkk. 2024). Hal ini yang mewujudkan “karakter” pada apa yang dirujuk. Proses internalisasi merupakan momen ketiga dimana individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Proses ini melibatkan sosialisasi primer yang berlangsung saat kecil, sebagai apa yang diketahui sedari awal dan sekunder di masa dewasa, sebagai apa yang diterima. Seluruh proses ini membentuk suatu persepsi pada apa yang digambarkan (Wikantoso, 2016). Ketiga proses ini berlangsung dalam suatu kontinuitas dialektis, saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam pembentukan realitas sosial.

Selain itu, proses konstruksi realitas sosial tidak dapat dipisahkan dari peran bahasa sebagai sistem simbol yang memediasi pemahaman dan interpretasi (Sulaiman, 2016). Bahasa memegang peran sentral dalam konstruksi realitas sosial melalui beberapa fungsi yakni sebagai sistem klasifikasi yang mengorganisir pengalaman, medium dalam pembentukan dan transmisi makna, sebagai alat legitimasi realitas sosial dan pembentukan kategorisasi sosial termasuk pada stereotip.

Cassirer (1944; dalam Agustianto, 2011) mengungkapkan manusia sebagai “*animal symbolicum*” atau lebih dikenal sebagai makhluk simbolik yang mengenali realita sebagaimana dengan simbol yang dipahami dan dimaknainya. Kenyataan tidak lain bukan sekedar fakta. Ia adalah yang tiada dan ada dan bukan sebenar-benarnya (Wahid, 2023). Hal ini diperkuat oleh Schutz (1967; dalam Dharma, 2018) menekankan bahwa individu tidak hanya pasif menerima realitas tetapi secara aktif menginterpretasi pengalaman mereka. Berger dan Luckman dalam pendekatan konstruksi sosial atas realitas

merujuk pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sistem stereotipe kawasan, sistem simbol ini berperan dalam pemberian makna pada tempat dan ruang, pembentukan identitas *teritorial*, kategorisasi sosial-spasial, dan transmisi stereotip antar generasi.

Stereotip diturunkan melalui berbagai jalur institusional dan informal, menjadikannya proses yang rumit. Seiring perkembangan masyarakat modern, keberadaan berbagai institusi sosial yang berfungsi sebagai agen pembentuk realitas semakin memperkaya proses ini. Setiap bentuk perubahan menambahkan dimensi baru pada bagaimana masyarakat memandang dan menafsirkan realitas sosialnya, tetapi mereka tidak mengurangi pentingnya komunikasi tatap muka atau cerita lisan, yang masih krusial untuk pengembangan pemahaman kolektif.

Mekanisme ini saling melengkapi, institusi sosial sangat penting dalam proses penciptaan realitas. Salah satu organisasi sosial yang paling kuat ialah media massa, membantu membingkai dan mengontekstualisasikan pengetahuan tentang topik tertentu selain menyebarkan informasi (Pamungkas, dkk. 2024). Proses ini tidak bersifat satu arah; melainkan, ia terlibat dengan tradisi lisan, pengalaman langsung pribadi, dan narasi masyarakat.

Media merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang berperan *saling*. Media massa tersusun pada dua padanan kata yakni "*media*" dan "*massa*". Media dalam konteks sosial-politis dapat dipahami sebagai suatu tempat, wahana, atau forum, yang bekerja sebagai penengah atau penghubung. "Massa" sendiri merujuk pada suatu hal kolektif yang tidak personal (Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. 2018). Pesan yang

dihubungkan ini merupakan suatu proses pertukaran informasi dari komunikator kepada khalayak. Media massa merupakan suatu institusi yang memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan dan budaya. Informasi ini memiliki standarisasi tersendiri mengenai pesan seperti apa yang disebarluaskan agar dapat diterima dengan baik oleh massa, pada beberapa unsur berikut: baru (faktor waktu), menarik, dan terutama memiliki nilai penting (Hikmah, dkk. 2024).

Keberadaan tradisi lisan dan narasi masih merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam interpretasi mendalam tentang proses konstruksi sosial, meskipun posisi hegemonik media massa sebagai institusi yang melegitimasi dan memainkan peran kunci dalam hal ini. Untuk menilai pentingnya tradisi lisan ini, dua komponen kunci dapat digunakan: Pertama, nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat yang telah tertanam dalam struktur masyarakat telah ditransmisikan secara lisan sejak sebelum munculnya media modern. Kedua, cerita yang ditransmisikan melalui kontak antarpribadi memiliki elemen kontekstual dan personal yang lebih dalam mempengaruhi pendapat orang karena melibatkan koneksi langsung dan pengalaman empiris.

Realitas sosial menjadi proses kompleks yang dibangun antar aktor. Pembentukan realitas sosial ini menempatkan manusia pada suatu proses dialektika sebagai pencipta sekaligus sebagai produk (Suryadi, 2011). Hannah Adoni dan Sherril Mane (dalam Suryadi, 2011; 638) menyatakan bahwa pembentukan realitas sosial dapat dibedakan ke dalam dua aspek yaitu pendekatan yang memfokuskan diri pada pentingnya aspek hubungan antara

kebudayaan dan masyarakat juga sebagai pendekatan yang melihat realitas sebagai bentuk dari efek atau dampak media.

Aspek ini menekankan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses yang berlapis. Hubungan kebudayaan dan masyarakat, baik individu secara aktif membangun pemahaman tentang realitas dalam interaksi sehari-hari. Kekuatan media di sisi lain memberi lapisan tambahan terutama di era saat ini dalam pembentukan realitas melalui proses *encoding* seperti yang diungkapkan oleh Stuart Hall (dalam Lu, 2023) saat media melakukan pengkodean pesan sesuai kerangka pengetahuan dan relasi produksi sendiri.

Pesan yang dikodekan atau digambarkan media tidak serta merta diterima oleh masyarakat sebagaimana bentuknya. Proses dialektis terjadi antara *encoding* dan *decoding* yang menciptakan ruang makna terus-menerus dinegosiasikan. Manusia dijelaskan oleh Wahid (2023) merupakan makhluk yang lebih ditentukan oleh stimulus-stimulus yang berasal dari luar serta dorongan dari dalam dirinya. Dalam proses ini manusia mengembangkan pemahaman pribadi yang membentuk subjektivitas dalam memaknai realitas dan ketika subjektivitas ini berinteraksi dengan subjektivitas individu lain dalam ruang interaksi sosial yang sama terbentuk intersubjektivitas atau suatu pemahaman bersama yang muncul dari negosiasi makna antar individu.

Subjektivitas dan intersubjektivitas merupakan dua konsep fundamental dalam memahami bagaimana makna dikonstruksi dalam konteks sosial. Konsep subjektivitas, menurut Lacan (1977; dalam Sheikh, 2017) merujuk pada pemahaman dan pemaknaan personal yang dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi individual terhadap realitas. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki cara unik dalam memahami dan memaknai dunia

berdasarkan kerangka referensi personal mereka yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, dan interaksi sosial. Sementara itu, intersubjektivitas menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam membangun makna di antara individu-individu dalam suatu komunitas. Hal ini juga yang dapat dipahami sebagai faktor pondasi stereotip.

2.1.2. Stereotip

Stereotip merupakan suatu citra yang melekat pada diri maupun suatu kelompok yang merupakan akumulasi dari apa yang ditampilkan oleh diri dan digabung dengan pandangan yang pada akhirnya membentuk suatu pernyataan dalam keadaan apapun bermakna sebagai benar dalam pandangan orang ketiga (Beeghly, E. 2015). Stereotip merupakan bagian dari dimensi konsep stigma yang diajukan oleh Erving Goffman (1961; dalam Dayanti & Legowo, 2021). Hal ini menjadi suatu generalisasi terhadap satu hal dengan melakukan pengabaian pada ciri-ciri dan terbatas hanya pada informasi yang memadai. Stereotip adalah kecenderungan seseorang atau kelompok—yang bukan diri mereka sendiri—untuk menawarkan konsep yang tidak biasa atau tidak akurat mengenai suatu subjek tertentu (Kulla, dkk. 2023). Stereotip sering kali terbentuk dari pengalaman terbatas yang dapat menyebabkan kesalahpahaman serta diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang terlibat.

Pengalaman tersebut dapat dikategorikan pada tiga macam yakni melalui interaksi atas pengalaman pribadi pada objek, melalui pengalaman yang relevan berdasar pada relasi atau pengalaman orang lain, dan pengalaman yang diperoleh berasal dari media informasi yang dapat memberikan gambaran tersendiri pada suatu objek (Kocsor, dkk. 2022). Stereotip merupakan produk budaya yang dibentuk berdasarkan kepercayaan bersama, sikap, dan

pengalaman. Hal ini terwujud sebagai bentuk penyederhanaan hal yang kompleks dari apa sebenarnya yang benar, maka pengalaman yang singkat dijadikan sebagai acuan untuk memaknai bahwa segala hal yang berada dalam konteks pengalaman tersebut, baik sebagai individu, kelompok maupun atas suatu kepercayaan adalah hal yang sama (Stegenga, J. 2024). Stereotip dibentuk untuk menyederhanakan waktu dan usaha untuk berpikir hal yang kompleks (McGarty, dkk. 2002; 3). Hal ini terbentuk karena manusia pada umumnya merupakan makhluk yang memiliki kapasitas, termasuk dalam memproses informasi tertentu. Stereotip merupakan suatu upaya untuk menciptakan informasi-informasi sederhana baginya.

Stereotip juga memiliki tujuan dan alasan lain mengapa hal ini dapat terbentuk seperti sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu bahkan politik. Padanan aturan sosial dalam budaya juga menjadi salah satu alasan mengapa stereotip terbentuk untuk menjadi bagian dari yang *besar* (McGarty, dkk. 2002; 8). Tujuan sosialnya adalah digunakan untuk mendukung interaksi sosial yang membangun rasa identitas kelompok (*ingroup identity*) dan membedakan diri dari kelompok lain (*outgroup differentiation*). Stereotip pada tujuannya sebagai alat politik memiliki kekuatan dasarnya untuk mempertahankan suatu bentuk kuasa kelompok dominan untuk menjustifikasi ketimpangan atau memperkuat hierarki yang ada (Bahry, dkk. 2024). Stereotip yang diterima terus-menerus pada individu atau kelompok dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan kelompok mereka. Robert K. Merton (1948) memaparkan konsep *self-fulfilling prophecy* yang menjelaskan ketika individu atau kelompok

berperilaku sesuai dengan ekspektasi yang ditunjukkan dan ditanamkan oleh stereotip yang berulang.

“If men define situations as real, they are real in their consequences”

(Merton, 1948; 193).

Kategorisasi terhadap stereotip dapat diklasifikasikan berdasarkan pada tujuannya selanjutnya didasarkan perbedaan pada intensitas dan dasar perseptualnya (McGarty, dkk. 2002; 4). Stereotip dibagi menjadi dua jenis yakni *heterostereotype* dan *autostereotype* (Murdianto, 2018; 141). Stereotip tidak selalu mengacu kepada hal negatif dapat juga dimaknai positif, tergantung pada hal apa dikaitkannya suatu identitas diri atau kelompok terhadap sesuatu (Siy & Cheryan, 2013).

Pembagian keduanya didasarkan atas kepada stereotip ini ditujukan, *heterostereotype* merujuk pada stereotip yang dimiliki terkait dengan kelompok lain, berfungsi untuk menggambarkan “kelompok luar” yang digunakan untuk menegaskan perbedaan dan menciptakan batas sosial antara “kita” dan “mereka”. (Grigoryev & Chvyakin, 2022). Contoh stereotip *heterostereotype* seperti “Orang sunda dikenal ramah dan murah senyum” merupakan pandangan dari luar kelompok yang menganggap suatu kelompok ini memiliki suatu karakteristik tertentu. Baron dan Paulus (dalam Bahry, dkk. 2024) mengungkapkan stereotip terjadi karena manusia cenderung membagi dunia ke dalam dua kategori kelompok, menegaskan ungkapan sebelumnya, bahwa kecenderungan ini dilakukan untuk menghemat tugas pada proses olah informasi yang menjemukkan untuk memahami secara individu.

Sementara itu *autostereotype* adalah stereotip yang terkait dengan dirinya sendiri. Jenis ini mencerminkan persepsi internal yang dapat memperkuat identitas kelompok yang digunakan sebagai pembanding dengan kelompok luar

(Alzahra, dkk. 2025). Contoh untuk menggambarkan *autostereotype* seperti “Kita orang desa memang biasanya kurang berpendidikan dibandingkan orang kota” yang mengarah kepada kelompok diri terhadap kelompoknya sendiri yang mengarah pada penilaian negatif.

Faktor-faktor yang membentuk stereotip cukup beragam, seperti pengaruh lingkungan sosial, budaya, media, pengalaman pribadi atau struktur sosial (Muchtar, dkk. 2016). Faktor ini meliputi berbagai elemen seperti landasan perseptual, sosial atau budaya, seperti media pada perannya menggambarkan suatu wacana, budaya melalui nilai-nilai lokal atau pengetahuan lokal yang turun-temurun membentuk suatu pola pikir pada masyarakat, peran sejarah yang menghasilkan suatu pandangan tertentu dan juga pengalaman pribadi, termasuk psikologi sosial dan struktur sosial-ekonomi (Pratisiya, dkk. 2023). Contoh faktor stereotip berdasarkan aspek budaya yakni pemahaman akan adanya budaya patriarki yang memandang setiap perempuan dengan pandangan tradisional yang menggambarkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan landasan perseptualnya, stereotip dapat dibentuk pada tiga bentuk, yakni berdasar basis pengalaman pribadi, budaya, terutama oleh media (Muchtar, dkk. 2016). Stereotip berdasarkan landasan perseptual merupakan stereotip yang terbentuk berdasarkan bagaimana orang memproses dan mengorganisasikan informasi dari apa yang mereka lihat, dengar atau alami secara langsung. Hal ini dapat mengacu pada pengamatan visual dan asumsi berdasarkan keterpaparan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana persepsi terhadap realitas tertentu berkontribusi dalam menciptakan stereotip. Stereotip berbasis pengalaman pribadi bersifat subjektif dan lebih dipengaruhi oleh bias

persepsi, sedangkan budaya cenderung berakar dalam identitas yang dikenal karena terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Peran media dalam hal ini menunjukkan *kekuatannya* sebagai aktor dalam membentuk stereotip yang dapat memperkuat juga melemahkan persepsi tertentu pada suatu hal diri maupun kelompok (Fadhillah, dkk. 2024).

Indikator untuk mengukur bagaimana dampak dan sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh stereotip ini dapat dipahami berdasarkan arah, intensitas dan ketepatan stereotip itu sendiri pada kelompok yang dituju. Arah stereotip dapat menunjukkan makna positif maupun negatif. Arah ini mengacu pada sejauh mana kemungkinan dampak yang diberikan atas stereotip ini. Intensitas stereotip tergantung pada tinggi dan rendahnya suatu kelompok atau individu itu memapari dan dipaparkan yang merujuk pada seberapa mendalam stereotip memengaruhi pikiran, perilaku atau keputusan. Faktor yang memengaruhi intensitas stereotip itu sendiri, kembali pada kekuatan pengalaman pribadi, media dan lingkungan sosial yang dibentuk berdasarkan interaksi, wacana berulang dan norma pada suatu kelompok. Stereotip berdasarkan ketepatan dapat tepat dan tidak tepat berdasarkan pada data empiris dan yang tidak memiliki dasar atau bersifat bias tanpa bukti yang kuat (Lampe & Anriani, 2016). Hubungan tinjauan indikator dengan faktor dan peranan stereotip berperan besar dalam menentukan dampak stereotip terhadap individu maupun masyarakat. Stereotip dengan arah negatif dan intensitas yang tinggi cenderung berbahaya karena menciptakan dampak diskriminasi atau prasangka yang nyata. Stereotip yang memiliki ketepatan rendah, diajukan tidak berdasar, digunakan pada tujuannya sebagai alat untuk memperkuat bias sosial atau

politik – yang mana terdapat relasi kuasa pada stereotip yang dibangun (Warami, H. 2013).

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan stereotip tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok sosial namun dapat berkembang menjadi prasangka yang lebih luas terhadap masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau kawasan geografis tertentu. Stereotip ini dapat ditelaah berdasarkan aspek budaya, praktik sehari-hari dan cara hidup yang terkait dengan lokasi geografis. Stereotip ini dapat mempengaruhi bagaimana pihak *outgroup* memandang seluruh individu atau kelompok yang berasal dari kawasan tersebut

2.1.2.1. Stereotip Kawasan

Louis Wacquant (dalam Cummins, 2016) menggunakan istilah “*stigma territorial*” untuk menggambarkan bagaimana kawasan-kawasan tertentu yang sering kali mengalami kemiskinan, dianggap sebagai simbol kegagalan moral atau sosial. Ciri ini menunjukkan generalisasi yang sudah terbangun lama, ketika melihat suatu kelompok yang dianggap dalam aturan norma sosial pada umumnya “tidak mampu” maka terdapat suatu penilaian yang umum memahami bagaimana melihat kelompok tersebut, meniadakan segala kebenaran dari yang benar.

Wacquant (2008a; 3) menekankan bahwa “*stigma territorial*” sebagai bentuk diskriminasi spasial yang melekat pada kawasan-kawasan tertentu. Proses stigmatisasi ini beroperasi melalui tiga dimensi utama yakni degradasi simbolik yang dialami oleh penduduk kawasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, efek negatif terhadap relasi sosial dan kebijakan publik yang memperkuat marginalisasi

kawasan dan erosi identitas serta kapasitas kolektif masyarakat untuk melawan pandangan tersebut. Kekuatan stigma yang disebutkan oleh Wacquant (2007; dalam Cummins, 2016; 5) menjelaskan bahwa *stigma territorial* dalam konsepnya dipahami tidak hanya merepresentasikan penilaian sosial yang bias namun berperan dalam mereproduksi dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial melalui mekanisme yang bersifat struktural,

Dalam konteks spasial, stereotip mengalami transformasi menjadi bentuk kategorisasi yang lebih kompleks, melibatkan antara interaksi dimensi fisik dan sosial suatu wilayah. Stigma suatu kawasan dapat dipahami melalui berbagai mekanisme sosial dari berbagai dimensi seperti dimensi struktural, sosio-kultural, temporal, dan relasional juga terhadap implikasi sosio-ekonomi (Sisson, A. 2021; 660). Relasi kuasa dalam pembentukan identitas kawasan, pembentukan narasi dominan tentang karakteristik kawasan, historisitas pembentukan stereotip kawasan, resistensi dan adaptasi komunitas lokal merupakan segala aspek yang membentuk dan mewujudkan stereotip pada kawasan. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai aktor sosial, termasuk media massa dan insitusi formal juga pengulangan narasi pada praktik keseharian masyarakat dalam mereproduksi atau merekonstruksi pemahaman tentang suatu kawasan (Sisson, A. 2021; 661). Stigma kawasan dalam konsep "*stigma territorial*" ini diungkapkan oleh Wacquant sebagai produk neo-liberal yang pada dasarnya semua kawasan merujuk pada hal yang sama yakni menggarisbawahi

kelompok marginal, seperti penggambaran masyarakat miskin, tidak sejahtera, tidak bermoral, sebagai ‘pengganggu’.

Stigmatisasi kawasan ini melibatkan pemahaman terhadap “ruang” atau suatu “kawasan” pada dua dimensi yakni, dimensi praktik dan representasi secara fisik maupun simbolik. Brenner dan Elden (2009; dalam Sisson, A. 2021; 666) menyebutkan bahwa wilayah telah dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang diproduksi ‘dari atas’ untuk tujuan dominasi dan kontrol, tetapi juga sebagai sesuatu yang diproduksi ‘dari bawah’ dalam perlawanan politik yang terorganisir. Suatu kawasan, wilayah, atau *ruang* secara spasial dalam hal ini dapat merepresentasikan kondisi yang terjalin pada kelompok didalamnya.

Stereotip seperti ‘*Negara Beling*’ merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu karakteristik kawasan yang terlampaui pada penggunaannya sama yakni mendeskripsikan karakteristik sosial dan spasial kawasan yaitu tindakan kriminalitas dan kawasan kumuh atau padat penduduk. Joshua Barker dalam esai yang berjudul “*Negara Beling: Street-Level Authority in an Indonesian Slum*” yang dimuat dalam buku “*State of Authority*” (2009) mengemukakan konteks spesifik pada kawasan Cicadas bahwa istilah ini itu merujuk pada penjelasan suatu kuasa sistem informal yang bekerja pada karakteristik kawasan yang dikenal kumuh. Cicadas menjadi kata yang tidak hanya merujuk geografis namun menjadi sebuah sinonim kriminalitas yang bertahan pada narasi wacana historis.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Analisa Wacana Kritis Fairclough

Wacana dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang menggunakan bahasa untuk merepresentasikan suatu realitas tertentu, Wacana tidak hanya dapat ditinjau dan dilihat dari segi linguistik melainkan dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupi wacana itu sendiri (Supriyadi, 2015; 97). Analisis Wacana Kritis merupakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan direproduksi dan dilawan melalui teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik (Munfarida 2014).

Bahasa dalam analisa wacana kritis tidak dipahau sebagai medium netral melainkan terletak di luar diri pembicara. Bahasa dirujuk kepada suatu representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, pada suatu tema-tema wacana tertentu juga termasuk terdapat strategi didalamnya (Supriyadi, 2015; 98). Analisa wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) tidak hanya memahami wacana sebagai praktik linguistik melainkan sebagai bentuk praktik sosial yang membentuk situasi, institusi dan struktur sosial

Pemikiran ini berdasar pada bagaimana bahasa sebagai medium dominasi dan kekuatan sosial yang berakar dari Aliran Frankfurt. Asumsi dasar dalam paradigma kritis dalam hal ini terhadap suatu wacana yakni terdapat keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu memiliki kuasa yang mengatur proses komunikasi dalam masyarakat (Supriyadi, 2015; 101).

Kerangka analisa yang dikembangkan oleh Fairclough dipengaruhi kuat oleh pemikiran Foucault tentang hubungan antara wacana,

pengetahuan dan kekuasaan serta hegemoni yang diungkapkan oleh Gramsci menjelaskan pada bagaimana dominasi dikonstruksi melalui persetujuan daripada suatu paksaan. Analisis Norman Fairclough berdasar pada sebuah pertanyaan besar yang menghubungkan teks dalam konteks mikro dengan konteks masyarakat yang makro (Sumarti, 2010; 158). Kedudukan utama bahasa melalui perspektif Fairclough ialah secara sosial dan historis sebagai bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Analisa terhadap wacana diperlukan untuk mengkaji relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Sumarti, 2010; 159).

“*Teks*” dipahami dalam hal ini pada pengertian luas yang mencakup bahasa tertulis dan lisan, gambar *visual*, suara, gestur dan segala bentuk semiosis yang membawa makna. Fairclough (1989; dalam Sumarti, 2010; 160) mengungkapkan bahwa analisis wacana kritis tidak menganalisis teks tetapi wacana, karena wacana dapat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas daripada hanya sebatas “*teks*”. Wacana digunakan untuk mengacu pada seluruh proses interaksi sosial yang didalamnya terdapat teks.

Fairclough dalam hal ini merangkai asumsi teoritis yang mengemukakan bahwa teks dan wacana dapat membentuk identitas sosial, hubungan sosial dan sistem pengetahuan dan kepercayaan. Identitas hubungan dan pengetahuan selalu hadir secara simultan pada konteks ini meskipun salah satunya dapat menduduki posisi lebih utama daripada lainnya. Mekanisme operasi pemahaman terhadap apa yang

disebut wacana oleh Fairclough terdiri dalam tiga dimensi yakni teks, praktik *kewacanaan*, dan praktik sosiokultural (Supriyadi, 2015; 103).

Fairclough (dalam Munfarida, 2014; 9) membagi analisa teks pada nilai-nilai yang terdapat dalam bentuk formal yakni nilai eksperiental yang merujuk pada jejak ideologis yang digunakan oleh produser teks dalam merepresentasikan dunia. Nilai ideologis ini menunjukkan bahwa analisa bentuk formal teks ini memiliki efek struktural berupa produksi pengetahuan dan keyakinan. Nilai selanjutnya yaitu nilai relasional sebagai jejak relasi sosial yang ditampilkan dalam teks. Nilai ekspresif juga termasuk yaitu bermakna sebagai jejak tentang evaluasi teks tentang realitas yang terkait. Nilai ini berkaitan dengan hubungan subjek dan identitas sosial. Nilai terakhir yakni nilai konektif yang menghubungkan bagian dalam teks selain memiliki arti menghubungkan bagian internal teks, namun juga menghubungkan dengan konteks situasional teks.

Proses analisa selanjutnya yakni pada proses interpretasi memahami bagaimana teks itu dikonsumsi oleh pembaca. Fairclough (dalam Munfarida, 2014; 11) memaparkan utamanya proses ini terbagi menjadi dua tahap yakni interpretasi terhadap teks dan situasi kontekstualnya. Level praktik kewacanaan atau pada tahap dua analisa Fairclough merupakan penghubung utama antar teks dan praktik sosial yang selanjutnya dikaitkan dan ditekankan pada aspek hubungan kontekstualnya atau pada hubungannya dengan analisa produksi, distribusi dan konsumsi teks itu sendiri (Sumarti, 2010; 162). Tahap

interpretasi ini terbagi menjadi empat tingkatan (Supriyadi, 2015; 105), yaitu:

1) *Surface of utterance* (Permukaan ungkapan)

Proses ini melibatkan penafsiran yang mengubah tanda-tanda dalam teks menjadi susunan kata merujuk pada kalimat dengan memanfaatkan tata bahasa dan kosakata.

2) *Meaning of utterance* (Makna ungkapan)

Tahap ini menjelaskan mengenai bagaimana makna pada ungkapan dalam teks dikupas menggunakan alat semantik dan pragmatik.

3) *Local coherence* (Koherensi lokal)

Proses interpretasi ini berfokus pada hubungan-hubungan makna di antara berbagai ungkapan yang menghasilkan suatu penafsiran yang koheren dengan bagaimana konteks yang berhubungan dengan makna itu sendiri.

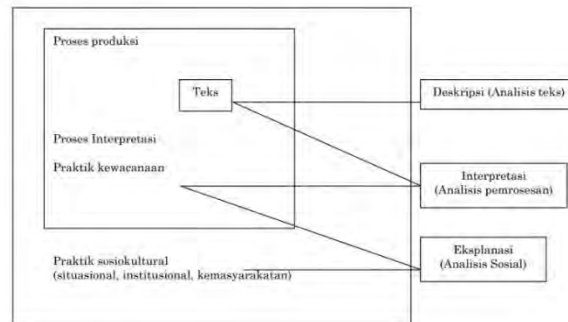
4) *Text structure and 'point'*

Pemahaman tahap ini menggunakan representasi atau pola-pola tertentu dari berbagai penafsir yang menggarisbawahi *'point'* sebagai ringkasan atau topik dari teks tersebut.

Skema pada hubungan dialektis analisa wacana Fairclough pada tahap ini menekankan dua hal yang harus digarisbawahi pada tahapan analisa yakni determinan dan efek. Determinan dan efek perlu dilihat dalam tiga level organisasi sosial yakni pada level sosialnya, institusional dan situasional. Tahapan ketiga pada skema ini yakni praktik sosiokultural yang merupakan dimensi yang berhubungan

dengan konteks di luar teks. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar wacana mempengaruhi kemunculan wacana itu sendiri.

Bagan 1.1 Tahapan Analisa Wacana Fairclough



Sumber: Sumarti (2010)

Pada dasarnya analisa wacana Fairclough ini menekankan bahwa kondisi sosial dapat dan sangat berperan menentukan bagaimana sifat diskursus yang dimiliki. Proses yang perlu dipahami adalah bagaimana pembuatan dan penafsiran teks juga peran aspek kognitif dalam keseluruhan proses ini secara sosial terbentuk dan memiliki sifat yang mewujudkan diskursus relatif terhadap persetujuan sosial dan tidak hanya berkaitan dengan teks itu sendiri. Fairclough menolak memahami penyamaan diskursus dengan adanya teks (Munfarida, 2014; 6).

Dalam konteks pemahaman stereotip kawasan, melalui skema analisa wacana Fairclough menjelaskan bagaimana representasi tentang suatu wilayah dan masyarakatnya tidak muncul dalam suatu ruang hampa, melainkan hasil dari proses historis yang panjang, dimana makna-makna tertentu dinaturalisasi dan diterima sebagai pengetahuan umum. Hal ini menunjukkan terdapat proses konstruksi makna terhadap realitas ketika suatu hal itu pada akhirnya menjadi pengetahuan umum

melalui bahasa, baik dalam pandangan pemaknaan terhadap dunia, relasi sosial yang terbangun dan identitas sosial bersifat ideologis karena memiliki potensi untuk memaparkan dominasi relasi dalam masyarakat (Munfarida, 2014; 15).

Ideologi dipandang dalam pemahaman Fairclough merupakan salah satu dimensi praktik diskursif yang ada dalam rangka transformasi relasi dominasi yang bersifat laten. Sifat laten dari ideologi yang melingkupi pada suatu diskursus ini menjadikan ideologi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan subjek dalam memaknai realitas serta mengarahkan praktik sosial. Ideologi diterima keadaannya sebagai suatu kebenaran menjadi *common sense* ini disebutkan Munfarida (2014; 16) berdasar pada adanya dua elemen yang dilibatkan yaitu elemen yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai '*the misrecognition of arbitrariness*' yang menjadikan suatu sistem makna terlihat transparan, yang menunjukkan transparansi ini muncul sehingga bahasa dianggap menampilkan realitas apa adanya dan sistem makna yang selalu didukung oleh kekuasaan yang melegitimasi baik konteks politik ataupun ahli intelegen.

Berdasarkan hal tersebut, stereotip atau istilah yang merujuk pada suatu hal, individu atau kelompok yang menggeneralisasikan keseluruhan bagian pada pemahaman yang terbatas dipahami melalui skema dialektis Fairclough sebagai hasil interaksi antara teks (*hal yang merepresentasikan*), praktik diskursif (*produksi dan konsumsi wacana*) dan praktik sosial (*konteks sosial*). Stereotip dapat dibentuk dari berbagai faktor terutama pada konteksnya berdasar dari faktor historis

yang *dilanggengkan* baik sadar atau tidak sadar terhadap suatu konteks yang melekatinya. Contoh stereotip yang melingkup satu kelompok berdasarkan pada fakta historisnya yakni “Suku Dayak itu Kanibal”. Stereotip ini muncul berdasar pada praktik ritual tertentu seperti pemenggalan kepala (*headhunting*) yang dilakukan oleh Suku Dayak sebagai bagian dari kepercayaan adat. Sifatnya stereotip ini tidak mudah hilang dan melekat pada akhirnya diterima sebagai suatu kebenaran pada pemahaman yang singkat terhadap sesuatu.

‘Negara Beling’ merupakan istilah yang melekat pada kawasan Cicadas dan digunakan untuk menggambarkan kawasan yang dianggap padat, kumuh, dan rawan kriminalitas. Secara leksikal¹, istilah ini terdiri dari kata “Negara” yang menandakan batas simbolik yang pada konteksnya merujuk kawasan dan aktivitas yang terjadi di dalamnya dan “*Beling*” merujuk pada kekacauan, kekerasan dan ketidakteraturan baik secara harfiah maupun metaforis. Dalam sejarah sosial dan narasi populer, label ini berkembang menjadi semacam sinonim informal untuk kawasan “keras” kawasan yang diidentikan dengan kekerasan, kerawanan dan pelanggaran norma sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa istilah “keras” bukan bekerja sebagai deskripsi objektif melainkan sebagai bagian dari konstruksi wacana yang dibentuk oleh interaksi (tidak pada kondisi alamiahnya “keras” berarti “keras” secara harfiah).

¹ Leksikal dalam ilmu linguistik merupakan aspek mendasar dari pemahaman bahasa. Makna leksikal ini juga sering disebut sebagai makna denotatif atau deskriptif. Secara garis besar merujuk pada makna kata-kata secara individual dalam bahasa tanpa mempertimbangkan konteks dan struktur kalimat.

Proses terbentuknya stereotip seperti ini tidak terjadi secara instan. Stereotip menjadi *common sense* (pengetahuan umum) ketika ia dilahirkan dalam konteks tertentu, dimaknai berulang dalam teks dan praktik sosial, serta diinternalisasi dalam keseharian sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Hubungan antara produksi teks, interpretasi makna, dan pembentukan persepsi inilah yang menjadi fokus utama kajian ini sejalan dengan pendekatan CDA Fairclough yang menekankan relasi dialektis antara bahasa, kuasa, dan struktur sosial.

2.3. Kerangka Pemikiran

Stereotip kawasan Cicadas dengan julukan “Negara Beling” menggambarkan wilayah yang diidentifikasi dengan kepadatan penduduk, kriminalitas, dan kondisi sosial-ekonomi tertentu. Julukan ini telah bertahan lama dan menjadi bagian dari wacana publik, baik dalam persepsi masyarakat setempat maupun dalam narasi eksternal. Pemahaman terhadap konstruksi stereotip ini memerlukan telaah yang mempertimbangkan dinamika sosial, historis, dan kultural yang melatarbelakanginya.

Konstruksi sosial memberikan kerangka untuk memahami bagaimana stereotip kawasan terbentuk sebagai hasil dari proses dialektis yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Bahasa sebagai medium simbolik, menjadi instrumen penting dalam membangun dan menyebarkan makna yang terkait dengan stereotip tersebut. Dinamika ini melibatkan berbagai aktor dan mekanisme sosial yang bekerja secara berkelanjutan. Pemahaman terhadap bagaimana kota dipandang sebagai sebuah ‘teks’ dan permukiman kota adalah proses konsumsinya juga penting dipahami untuk menganalisa bagaimana permukiman informal berada pada kawasan yang dipandang ‘*stagnan*’.

Pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk menjelaskan tiga dimensi yang berkaitan dengan stereotip ini: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Dimensi teks menyoroti bagaimana stereotip direpresentasikan, praktik diskursif melihat proses produksi dan konsumsi wacana, sementara praktik sosial memeriksa bagaimana konteks historis dan sosial-ekonomi membentuk pemaknaan stereotip.

Hubungan antara konstruksi sosial, wacana, dan stereotip kawasan menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana makna tentang “Negara Beling” terbentuk, direproduksi, dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini membantu menyoroti dimensi sosial dari label kawasan yang selama ini lebih sering dianggap sebagai realitas yang tidak dapat diubah.



Bagan 1. 2. Kerangka Pemikiran

